

AM I POLITICAL ENOUGH?: PRAKTEK E-CITIZENSHIP OLEH PEMUDA YANG AKTIF DALAM OKP SECARA OFFLINE

Desideria Cempaka Wijaya Murti*

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

desideriacempaka@gmail.com

Abstrak

Aktualisasi partisipasi politik pada banyak negara memang terlihat wajar menggunakan media konvensional sebagai wujud keterlibatan setiap orang dalam memberi dukungan terhadap kegiatan politik. Tulisan ini, memberikan wacana terhadap media online sebagai wadah bagi partisipasi politik, khususnya para pemuda di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) dengan para peserta adalah pemuda dari organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana mereka berdiskusi dalam wadah organisasi pemuda ini, serta mengetahui dinamika hubungan organisasi ini dengan jaringan serta aktifitas online mereka. Untuk itu peneliti akan menggunakan jenis organisasi yang berbeda untuk melihat bagaimana sebuah komunitas sipil bergerak dalam politik via media online baik secara organisasi maupun individu. Penulis menggunakan metode sistematis deskriptif untuk melakukan interpretasi dan analisis data dari Tape recording dan transkrip oleh notulen.

Kata-kata kunci : Politik, Media Online, FGD

Abstract

Actualization of political participation in many countries it seems natural to use conventional media as a form of involvement of each person in giving support to political activities. This paper, giving a discourse on online media as a platform for political participation, especially the youth in Indonesia. This paper is the result of research by using research methods discussion or Focus Group Discussion (FGD) with the participants are young people from youth organizations. The goal is to find out how they discuss in containers youth organizations, as well as knowing the dynamics of the organization's relationship with the network and their online activities. To the researchers will use different types of organizations to see how a civil society engaged in politics via online media both organizations and individuals. The author uses descriptive systematic methods for interpreting and analyzing the data from the tape recording and transcript of the minutes.

Key words: Politics, Media Online, FGD

Perkembangan media online sebagai ruang publik untuk berpolitik sudah menjadi wacana yang telah diperdebatkan dan diteliti oleh akademisi dan para ahli. Pemuda sebagai generasi “transisional” (White & Naafs, 2012) menjadi kelompok publik yang dominan dalam partisipasi politik di media online (Bennett & Segerberg, 2011; Bennett, Wells, & Freelon, 2011; Dahlberg, 2001). Meskipun demikian, berbagai argumen mengenai kondisi pemuda itu sendiri juga cukup ironis. Misalnya dalam studi defektologi

kepemudaan, menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok yang skeptis terhadap demokrasi dan politik (Levine, 2008). Selain itu, pemuda juga dianggap sebagai kelompok demografis yang merupakan “digital native,” “generation Y,” “Net Generation,” tetapi ironisnya memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai berita dan pengetahuan politik (Flanagin & Metzger, 2008; Metzger & Flanagin, 2008). Tetapi pada saat yang sama, media online menawarkan berbagai kesempatan untuk pemuda agar terlibat dalam politik

*Penelitian ini merupakan sebagian dari hasil penelitian besar yang didanai oleh SUMITOMO FOUNDATION, Jepang.

dan berpartisipasi sebagai warga Negara (citizenship) dengan mengikuti gaya hidup mereka (civic style), mengikuti cara berkomunikasi pemuda (communication style), dan membangun terbentuknya komunitas online pemuda (Bennett et al., 2011; Woolley, Limperos, & Oliver, 2010). Oleh karena itu, ada banyak area untuk mengembangkan teori dan konsep partisipasi kepemudaan dalam dunia online tetapi dengan konteks yang berbeda sehingga mengundang berbagai perspektif untuk dipahami (Loudon, 2010).

Partisipasi politik pemuda Indonesia melalui media online, khususnya Yogyakarta, merupakan konteks penelitian ini. Ada beberapa alasan yang penting untuk meneliti topik ini. Pertama, Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang memiliki penetrasi teknologi yang tinggi. Meskipun Indonesia dianggap sebagai “Lower Middle Income Country” (Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah) oleh World Bank, tetapi lebih dari 41 juta penduduk Indonesia telah menggunakan Facebook (Lim, 2012). Ini berarti bahwa 16,68% dari total populasi di Indonesia ada di Facebook. Bahkan populasi pada akun Twitter di Indonesia telah menduduki posisi ke enam di dunia (Lim, 2012).

Kedua, pemuda Indonesia memiliki peran yang penting dalam partisipasinya di dunia online maupun politik. Pemuda berperan sebagai produsen budaya dan sekaligus sebagai konsumen budaya terbesar dalam dunia digital (White & Naafs, 2012). Misalnya, pemuda menciptakan budaya dalam penggunaan bahasa baru dalam microblogging (Maireder & Schwarzenegger, 2012), selain itu pemuda juga menciptakan pembentukan jenis organisasi kontemporer baru berupa organisasi online yang bergerak, bertumbuh, dan memiliki tujuan (generic, organic, destined organization) (Bimber, Flanagin, & Stohl, 2010). Pemuda juga berperan dalam berbagai pergerakan sosial di Indonesia (Murti, 2013; Situmorang, 2013), serta kampanye partai politik (Situmorang, 2013), dan lain-lain. Ketiga, Yogyakarta sebagai pusat kepemudaan antara lain sebagai berkumpulnya pelajar-pelajar dari berbagai penjuru Indonesia untuk belajar di kota pelajar ini (Adji, 2010). Ini menciptakan miniatur Indonesia yang memiliki berbagai macam segmentasi kelompok kepemudaan dari suku, etnis, dan agama. Pergerakan pemuda di Yogyakarta juga sangat aktif misalnya dengan adanya sejumlah kelompok pemuda yang dilandasi oleh persamaan etnis, suku, hobi/kesukaan, dan agama di Yogyakarta. Ini menunjukkan adanya peluang untuk memahami lebih lanjut partisipasi online pemuda Indonesia, khususnya jika diteliti dari pusat kepemudaan seperti kota Yogyakarta.

Ketiga, adanya kebutuhan penelitian untuk memahami

konteks partisipasi politik dalam Negara demokrasi non-western context. Telah banyak penelitian mengenai partisipasi politik pemuda dari Negara barat. Misalnya penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam pergerakan protest ‘uniberg’ (University is burning) di Austria melalui Twitter dan Facebook untuk mendemo aturan pendidikan (Maireder & Schwarzenegger, 2012). Ada pula penelitian dari Jerman mengenai debat politik dan proses deliberasi publik (Albrecht, 2006). Juga penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam grup online yang bergerak, baik untuk kepentingan sipil dan politis di Amerika Serikat (Bennett et al., 2011; Flanagin & Metzger, 2008; Hoff, 2010). Tetapi, tidak banyak dilakukan penelitian mengenai partisipasi politik di Asia khususnya Indonesia. Penelitian lapangan yang telah dilakukan mengenai organisasi pemuda dalam konteks politik di Indonesia kebanyakan adalah penelitian dalam dunia offline. Seperti penelitian mengenai partisipasi politik kader Nahdatul Ulama (NU) dalam dunia politik (Auliya, 2011), atau penelitian mengenai keterlibatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam pembangunan politik di Provinsi Jawa Barat (Rukminijati, 1995). Sementara penelitian yang cukup mumpuni mengenai pemuda Indonesia dan media online di tingkat internasional juga belum banyak. Misalnya penelitian mengenai blog Islam dalam kontribusinya untuk pembentukan komunitas global, opini dan pergerakan sosial dalam isu yang menyangkut umat Islam (Lim, 2012). Contoh di atas telah menunjukkan adanya kebutuhan penelitian yang perlu dilakukan untuk melihat partisipasi politik pemuda di Indonesia yang dilakukan di media online.

Proposal penelitian ini mencakup beberapa bagian penting. Pertama, penelitian ini akan menggunakan framework yang sudah berkembang dalam konsep, teori, dan model partisipasi politik dalam dunia online. Kedua, melalui penelitian ini, penajagan terperinci mengenai partisipasi pemuda dalam politik secara online akan dilakukan dalam Focus Group Discussion. Proses ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan data secara kolektif dan merangsang pertumbuhan diskusi kelompok untuk memahami bagaimana pemuda berpartisipasi dalam politik melalui media online. Platform desain penelitian seperti FGD ini berguna untuk membangun dasar integrated research (riset terintegrasi yang akan dilakukan di masa mendatang). Penelitian kualitatif semacam ini mampu menggali lebih dalam mengenai dinamika yang menarik untuk diteliti saat ini maupun waktu mendatang. Ketiga, adapun hal-hal yang bersifat operasional seperti penjadwalan dan anggaran riset juga dibuat secara mendetail agar dapat dipertanggung jawabkan.

Kerangka Teori

Perkembangan teori mengenai konsep partisipasi politik terutama hubungannya dengan keikutsertaan publik dalam aktivitas kewarganegaraan (citizenship) sudah banyak mengalami perubahan secara historis. Mulai dari perkembangan yang diajukan oleh Robert Putnam (1993) mengenai konsep civil society atau masyarakat sipil, social capital atau modal sosial, hingga pembangunan “democracy which works” dimulai dari lingkungan atau organisasi sipil yang menyesuaikan diri dengan media komunikasinya. Pada pembahasan teoritis, bagian ini dibagi menjadi tiga. Dimulai dengan pengkajian teoritis mengenai perkembangan organisasi kepemudaan dari sejarahnya hingga bentuk kontemporernya saat ini. Kemudian beranjak ke pembahasan mengenai hubungan partisipasi pemuda ini dengan generasi online. Diakhiri dengan bentuk kewarganegaraan dan hubungannya dengan gaya hidup dan cara berkomunikasi yang sudah berubah dari waktu ke waktu. Berikut kajian teoritisnya.

Partisipasi Warga Negara dan Organisasi Masyarakat Sipil

Perkembangan mengenai partisipasi warga Negara dikembangkan dari konsep civil society atau pengertian dan fungsi mengenai masyarakat sipil. Robert Putnam, dalam bukunya *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy* (1993), membawa diskusi di kalangan akademisi dengan mempertanyakan dan mengkritisi konsep masyarakat sipil ini. Civil society sendiri merupakan landasan dibangunnya demokrasi yang merupakan hasil dari network para warga Negara yang aktif pada tingkat lokal (Mouritsen, 2003). Interaksi antara warga Negara yang aktif ini dapat menghasilkan modal sosial (social capital) yang akan membantu terbentuknya komunitas sipil. Berbagai riset tentang pembentukan komunitas sipil yang mampu memberikan dampak sosial yang luas sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Misalnya pengaruh organisasi masyarakat pada pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal. Salah satu contoh adalah dalam studi kasus di etnis Turki dan Maroko di Belanda (van Londen, Phalet, & Hagendoorn, 2007). Selain itu komunitas masyarakat sipil mampu mengarahkan anggotanya untuk melakukan pergerakan sosial dan politik yang jangkauannya lebih dari grupnya sendiri. Misalnya penelitian mengenai keterlibatan politik dan sosial pada organisasi masyarakat kelompok Afrika-Amerika di Amerika Serikat. Organisasi ini yang mampu menjangkau kepentingan publik di luar kelompok itu sendiri (Mc Kenzie, 2007). Penelitian untuk mengembangkan konsep masyarakat sipil yang dibawa Putnam (1993) dan terus dikembangkan hingga

menjangkau analisis mengenai kontribusi modal sosial pada area politik dan demokrasi (Mouritsen, 2003).

Modal sosial merupakan bagian penting dalam masyarakat sipil. Modal sosial atau social capital merupakan hasil dari keberadaan partisipasi politik, kualitas administrasi pemerintahan, perkembangan ekonomi, produktivitas populasi, hingga karakter responsive dari pemerintahan setempat dan komunitas masyarakat (Putnam, 1993; Mouritsen, 2003). Komunitas ini mampu meningkatkan hubungan interpersonal dan area konektivitas bagi masyarakat sipil. Putnam (1993) menekankan bahwa area konektivitas ini justru adalah area yang sifatnya rekreasional atau dibentuk dalam recreational sphere. Memang banyak kritik menyebut bahwa komunitas ini menjadi tidak political enough atau lebih cenderung pada aktivitas sosial dan bukan aktivitas politik (Mouritsen, 2003). Tetapi banyak peneliti dan ahli yang menyebutkan grup-grup informal yang mampu membangun trust di dalam komunitas, hingga pembentukan norma dan habit atau kebiasaan, justru memungkinkan terbentuknya local network (Mouritsen, 2003) dan public sphere atau area publik. Misalnya organisasi yang awalnya seperti salon kaum borjuis yang mampu membuat deliberasi sosial hingga organisasi modern seperti YMCA, Sierra Club, National Rifle Association, Taking IT Global (Bennett & Segerberg, 2011). Semua organisasi ini notabene dipelopori oleh anggota masyarakat sipil yang berada di luar pemerintahan dan membantu pembentukan supportive governance (Mouritsen, 2003).

Anggota masyarakat sipil yang masuk dalam kantong-kantong organisasi kemasyarakatan baik yang rekreasional, non formal, hingga sudah berkembang menjadi organisasi politik mampu mengembangkan demokrasi yang sehat. Masyarakat sipil ini membentuk komunitas dan area publik yang terdiri atas model-model organisasi atau institusi yang menyokong suatu pemerintahan atau bahkan melawan pemerintah (Putnam, 1993; Mouritsen, 2003). Organisasi lokal ini mampu memberikan kontribusi pada masyarakat atau yang disebut Putnam, *liberta commune* atau “liberty as common good” (Putnam dalam Mouritsen, 2003, p. 654). Kontribusi yang sifatnya meningkatkan elemen kebebasan dalam proses berdemokrasi. Selain itu organisasi masyarakat ini juga mampu untuk meningkatkan interaksi masyarakat. Interaksi ini berakibat pada peningkatan kompetensi politik, pandangan egaliter, kemampuan berkompromi, hingga perhatian kepada tokoh politik dari masing-masing anggota organisasi ini (Albrecht, 2006; Mc Kenzie, 2007; Mouritsen, 2003).

Pada akhirnya, banyak penelitian telah mengkarakterisasi organisasi yang disebut-sebut oleh

Putnam mampu berfungsi sebagai komunitas sipil (1993). Karakteristik itu antara lain adalah organisasi masyarakat ini cenderung memiliki semangat volunteerisme atau adanya kerelaan untuk beraktivitas dalam organisasi ini (Mouritsen, 2003; Ward, 2011). Selain itu fokus organisasi ini adalah pada isu lokal dan berbasis pada perhatian mereka terhadap masyarakat, lalu baru berkembang pada isu nasional (Mc Kenzie, 2007; Mouritsen, 2003). Terakhir, organisasi ini cenderung memiliki gaya komunitarian atau kebersamaan dan bebas dari keinginan untuk membuat konflik dengan status quo (Mouritsen, 2003). Sehingga organisasi kemasyarakatan ini akan menjadi supportive element dalam pemerintahan dan demokratisasi pada tingkat lokal dan nasional, terutama hubungannya dengan pembentukan network, penyebaran isu dan opini, serta pergerakan sosial (Mc Kenzie, 2007; Van Heelsum, 2005; van Londen, Phalet, & Hagendoorn, 2007). Sementara semangat perlawanan dan pemberontakan hanya akan muncul jika ada opresi yang begitu kuat sehingga membuat organisasi ini berbalik melawan pemerintahan (Mouffe, 1999).

Organisasi kemasyarakatan ini juga memiliki ciri khas dari segi demografis anggotanya, yakni para anggotanya memiliki energi untuk produktivitas kerja, responsive terhadap isu, dan aktif dalam gerakan sosial. Ciri khas ini dimiliki oleh usia produktif yang masih dalam proses belajar dan mengamati. Populasi masyarakat yang disebut sebagai pemuda.

Partisipasi Pemuda, Kewarganegaraan, dan generasi online

Pemuda Indonesia dikenal sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat aktif dalam pembentukan pemerintahan. Bahkan Pemuda Rengas Dengklok adalah kelompok pemuda yang mendorong terjadinya Proklamasi 45. Dimulai dari perkembangan pergerakan pemuda yang melakukan deliberasi untuk menciptakan formula atau "sacred pledge" (Malik, 1968). Angkatan pemuda yang disebut sebagai generasi 28. Lalu muncul gelora pergerakan pemuda kemerdekaan yang dipimpin oleh "Bung" Karno, yang menyimbolkan semangat muda, yakni generasi 45 (Malik, 1968). Jaman dimana pemuda disebut sebagai kelompok masyarakat yang membawa Indonesia dari "darkness to light" atau yang disebut juga sebagai "the age in motion" (Lee, 2011; Malik, 1968). Kemudian muncul generasi 66 yang disebut sebagai generasi restorasi demokrasi (Malik, 1968). Generasi ini adalah kelompok pemuda dengan semangat indoktrinasi yang tinggi yang mempertahankan keberadaan Orde Baru. Kelompok pemuda yang memastikan bahwa konstitusi dan semangat demokrasi yang mendukung

stabilitas pemerintahan Soeharto dapat berjalan dengan lancar. Bahkan generasi ini mendapat sokongand dari para tentara dan angkatan bersenjata (Malik, 1968). Terjadinya krisis 98, menyebabkan munculnya generasi pemuda 98 yang merupakan generasi reformasi (Lee, 2011). Kelompok pemuda ini bergerak dalam semangat transisi pemerintahan pada tahun 1999 hingga 2001. Melalui pandangan yang dituangkan dalam banyak gambar dan produk visual, generasi ini sebenarnya memiliki pandangan sayap kiri (Lee, 2011). Bahkan generasi ini disebut sebagai perlambang "New model of world citizen" yang menentang penguasa, diktatorisme, dan juga kapitalisme (Appadurai & Breckenridge, 1988 dalam Lee, 2011, p. 312).

Pergerakan kepemudaan yang begitu kuat, dimulai dari level lokal yang bersandi pada organisasi-organisasi kepemudaan. Basis konektivitas dalam organisasi kepemudaan ini diisi dengan berbagai aktifitas non-formal, rekreasional, hingga aktivitas sosial, dan politik. Meskipun sebenarnya aktifitas ini tidak disadari dampaknya tetapi, sering sekali organisasi sosial mampu membawa opini publik terhadap suatu keputusan politik (LiPuma & Koelble, 2009; Mc Kenzie, 2007; van Londen et al., 2007). Apalagi dengan adanya perkembangan media online. Para pemuda dengan kemampuan tangkap dan tanggap teknologi yang lebih cepat mampu memanfaatkan media online ini untuk terlibat secara sosial dan politik.

Tidak banyak penelitian yang melihat pada keterlibatan pemuda Indonesia dalam bidang politik dilihat dari kaca mata media online. Padahal di Negara-negara barat penelitian semacam ini sudah sangat umum dan berkembang pesat. Misalnya penelitian mengenai debat politik dalam suatu grup online yang beranggotakan para pemuda Hamburg Jerman (Albrecht, 2006). Penelitian ini mampu melihat secara mendetail mengenai debat kelompok pemuda skeptis yang berpikir "politic as usual" dengan grup pemuda yang optimistic terhadap demokrasi. Penelitian lain juga memperlihatkan penggunaan Media Online pada kampanye electoral pada blog, Facebook, Youtube, dan Twitter pada pemilihan presiden Romania (Aparaschivei, 2011). Pada penelitian ini, tampak bahwa tidak ada politisi dalam dunia online yang bisa bermain aman atau jaga image. Semua memperoleh kesempatan untuk dikritisi oleh berbagai pihak, meskipun tidak menutup kemungkinan usaha pembentukan image positif juga bisa dilakukan (Aparaschivei, 2011). Sementara penelitian di Indonesia antara lain adalah penelitian mengenai globalisasi pemuda muslim Indonesia di dunia blog dalam kaitannya dengan isu ummat Muslim dunia (Lim, 2012). Penelitian ini menunjukkan adanya spiral of silence dalam media online jika pendapat

mereka merupakan pandangan minoritas (Lim, 2012). Lalu ada pula penelitian mengenai pergerakan sosial yang mengarah menjadi gerakan politik. Penelitian ini melihat bahwa Facebook mampu menjadi area diskusi dan koordinasi politis bagi para anggotanya untuk membawa komunitasnya berimbas lebih luas di masyarakat (Murti, 2013). Tetapi penelitian yang bisa mengidentifikasi konsep keterlibatan pemuda dan organisasinya dengan konsep kewarganegaraan yang berkembang pesat di Negara maju belum banyak. Padahal melalui konsep citizenship ini, keterlibatan pemuda dalam dunia online dapat dideteksi secara komprehensif.

Komunikasi Warga Negara (Civic Communication) dan Gaya Partisipasi Warga Negara (Style of Citizenship)

Konsep partisipasi kewarganegaraan dalam konteks ilmu komunikasi sangat erat hubungannya dengan gaya hidup masyarakat sipil dan cara berkomunikasi. Lance Bennett telah mengembangkan konsep citizenship dan hubungannya dengan komunikasi dan gaya anak muda dalam berpolitik (Bennett, 2008). Pembagian citizenship menjadi Dutiful Citizenship (DC) atau Warga Negara yang melaksanakan kewajiban (WNK) dan Self Actualized Citizenship (AC) atau warga

Negara yang mengaktualisasi diri (WNAD). Ini juga berhubungan erat dengan adanya konsep konvensional dan kontemporer masyarakat sipil (Bennett, 2008; Ward, 2011; Woolley et al., 2010). Bagan berikut akan menjelaskan secara mendalam mengenai perbedaan DC dan AC dalam kategori gaya berpolitik ala masyarakat sipil dan logika komunikasinya.

Lihat Bagan 1 tentang perbedaan Dutiful Citizenship/Warga Negara yang melakukan kewajiban dan Actualized Citizenship atau Warga Negara yang mengaktualisasi Diri (Bennett et al., 2011, p. 840)

Tinjauan kewarganegaraan dalam ranah komunikasi menjangkau hingga area kompetensi dalam kategori partisipasi politik (Bennett, 2008; Woolley et al., 2010). Antara lain:

Pengetahuan yang penting untuk menjadi warga Negara yang efektif (knowledge), kompetensi ini berada dalam ranah kognitif. Kompetensi ini dekat dengan pola berpikir DC yakni yang meliputi informasi mengenai sejarah, konstitusi, tokoh pendiri, perang, bagaimana proses demokrasi dan pemerintahan, kandidat pemilihan umum, hingga posisi pada isu politik tertentu (Bennett et al., 2011)

Keterampilan berekspresi yang perlu dikomunikasikan secara efektif (skill for expression), kompetensi ini masuk dalam area afektif. Misalnya termasuk wacana, kerjasama, negosiasi, kemampuan persuasif, hingga

Bagan 1

Jenis WN	Gaya berpolitik sipil	Logika Komunikasi
WNK/DC	<ul style="list-style-type: none"> Berorientasi pada masukan masyarakat kepada pemerintah melalui jalur organisasi public yang formal, kampanye, dan institusi Berakar pada kewajiban dan tanggung jawab Terhubung melalui keanggotaan dalam grup sosial yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Mengutamakan konsumsi manajemen informasi sipil yang satu arah, misalnya berita dan iklan politik Ketika individu berekspresi dan memproduksi, biasanya ditujukan pada target institusional misalnya surat kepada surat kabar, atau kandidat terpilih
WNAD/AC	<ul style="list-style-type: none"> Terbuka pada berbagai macam masukan warga yang kreatif dan luas mulai dari pemerintahan hingga pergerakan global Berakar pada aktualisasi diri melalui ekspresi sosial Kepentingan pribadi dihubungkan melalui jaringan yang lebih fleksibel keterikatannya 	<ul style="list-style-type: none"> Garis pemisah antara konsumsi konten/isi dan produksi individu tidak jelas Produksi konten individu dan pertukaran pada jaringan terikat oleh identitas personal, misalnya identitas di Facebook atau Viral Video.

penguasaan alat komunikasi seperti menulis artikel untuk mengekspresikan dirinya pada konteks public yang luas (Bennett et al., 2011)

Kemampuan yang dibutuhkan untuk bergabung dalam grup dan jaringan yang muncul, mengkoordinir, serta mengatur segala sesuatu mengenai isu atau tokoh politis (join network and group skill). Kompetensi ini masuk dalam area psikomotorik. Kompetensi ini termasuk bagaimana mengorganisir acara bermuatan politik, melaksanakan rapat, menemukan consensus dalam grup, kemampuan memimpin, pengalaman dalam dinamika komunitas, dan pemahaman mengenai peran organisasi (Bennett et al., 2011)

Kemampuan yang dibutuhkan untuk mengambil sikap dalam suatu isu spesifik atau peraturan tertentu (take action skill). Kompetensi ini masuk dalam area psikomotorik. Pada tahap ini organisasi atau individu sudah sampai pada level partisipasi dan keterlibatan misalnya voting, mengembangkan intensi positif terhadap aktivitas pemilihan umum, mengerti bagaimana berafiliasi dan mendukung partai politik atau gerakan sosial, pencarian dana untuk kampanye, hingga ikut turun sebagai yang dipilih, protes di jalan, dan melakukan graffiti politis (Torney-Purta et al., 2001 dalam Bennett et al., 2011)

Selain itu, jenis partisipasi kewarganegaraan ini juga membedakan fungsi dan pelaksanaan aktifitas peningkatan kompetensi dalam masyarakat sipil ini. Berikut ini bagan yang menunjukkan kategori DC/WNK dengan AC/WNAD dengan pembelajaran masyarakat sipil.

Lihat Bagan 2 tentang DC/WNK dan AC/WNAD dalam Kategori Pembelajaran Gerakan Masyarakat Sipil (Bennett et al., 2011, p. 842)

Bagan dan kategorisasi ini bukan bermaksud

untuk mengkotak-kotakkan sebuah populasi atau demografis tertentu. Bisa saja satu organisasi atau individu melaksanakan kedua jenis partisipasi kewarganegaraan. Tetapi bagan ini bekerja sebagai framework untuk membantu operasionalisasi penelitian yang akan menggali sejauh mana partisipasi politik suatu organisasi kepemudaan dan individu pemuda dalam media online. Platform penelitian yang dilandasi teori dan konsep yang berkembang saat ini masuk dalam bagian pembahasan metode riset berikut ini.

METODE RISET

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian diskusi grup terarah atau Focus Group Discussion. Penelitian ini ditujukan bagi grup yang memiliki organisasi paying dan anggotanya sudah terkumpul karena memiliki alasan tertentu. FGD mampu membawa orang-orang yang memiliki kesamaan untuk berbagi suatu masalah, isu, pendapat, maupun kebiasaan yang mungkin akan lebih sulit disampaikan di kelompok besar. Tujuan penelitian dengan diskusi ini juga agar terkumpul data kolektif dan terkumpul data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali secara mendalam mengenai isu atau topic penelitian. Pendekatan kualitatif mampu membuka kemungkinan jawaban karena jenis pertanyaan yang bersifat terbuka tetapi diarahkan pada topic yang mampu menjawab pertanyaan riset (Gosling&Edwards, 2003).

Establishing Baseline: FGD

Diskusi grup yang terarah berfungsi untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan mendetail mengenai suatu topik (USAID, 1996). Informan akan berkumpul di suatu tempat, dan fasilitator

Bagan 2

Jenis kompetensi	DC/WNK	AC/WNAD
Knowledge: Informasi yang masyarakat perlu tahu	Informasi disediakan oleh pihak yang memiliki otoritas	Informasi diciptakan dan dibagikan kepada teman sekomunitas
Expression: Efektifitas kemampuan komunikasi publik	Pelatihan untuk bentuk tradisional dari isu public kepada institusi dan otoritas	Pelatihan untuk memproduksi sendiri dan mendistribusikan media digital
Join Public: Belajar mengenai bagaimana berhubungan dengan yang lain melalui jaringan dan grup	Keanggotaan dalam organisasi yang hirarkis, dan dalam bentuk yang tradisional.	Keanggotaan dalam network yang ditentukan sendiri atau karena kesepakatan bersama
Take Action: Aksi yang melibatkan warga Negara untuk isu public dan kampanye	Aktifitas yang didefinisikan dan diatur oleh organisasi formal dan pihak yang memiliki otoritas	Aktifitas yang ditingkatkan dan dibangun oleh pertemanan

yang handal dan dapat memimpin jalannya diskusi berfungsi mengendalikan pertanyaan serta dinamika diskusi (Emergency Capacity Building Project, 2007). Fasilitator atau moderator tersebut akan memastikan semua anggota diskusi mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara. Selain itu proses diskusi ini akan sungguh-sungguh didokumentasikan dan ditranskrip sebagai cara untuk memperoleh data untuk analisis.

Participant of FGD

Peserta FGD adalah pemuda yang terlibat dalam organisasi yang sama. Sehingga pendekatannya adalah memilih organisasi kepemudaan dan mengundang anggota dalam organisasi tersebut untuk berdiskusi dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana mereka berdiskusi dalam wadah organisasi pemuda ini, serta mengetahui dinamika hubungan organisasi ini dengan jaringan serta aktifitas online mereka. Untuk itu peneliti akan menggunakan jenis organisasi yang berbeda untuk melihat bagaimana sebuah komunitas sipil bergerak dalam politik via media online baik secara organisasi maupun individu.

HASIL PENELITIAN

Pemetaan Sample

Informan dari penelitian ini direkrut melalui organisasi online yang aktif dalam berbagai ranah masyarakat sipil.

Organisasi yang berbasis hobi dan perkumpulan pergerakan sipil:

Organisasi Debat Mahasiswa merupakan organisasi yang dirujuk sebagai peserta FGD. Perkumpulan mahasiswa yang dimulai dengan hobi mereka mengikuti lomba debat berbahasa Inggris. Mahasiswa dalam organisasi ini juga terdiri dari berbagai jurusan antara lain Hubungan Internasional (2 orang), Ilmu Komunikasi (2 orang), Bahasa Inggris (1 orang). Kecintaan mereka dengan dunia debat membuat peserta FGD ini menjadi target yang menarik untuk dilihat sebab keaktifan mereka mencari informasi, mengikuti organisasi, maupun mengukir prestasi menjadi hal yang umum di kalangan peserta FGD. Meskipun bergerak di bidang minat dan bakat, tetapi prestasi akademik pemuda yang terlibat dalam organisasi ini tidak diragukan lagi. Kebutuhan aktifitas debat untuk harus mencari ilmu untuk membangun argument membuat anggota organisasi memiliki pengetahuan yang mengglobal, dan selalu ter-update dengan isu lokal, nasional, maupun global.

Organisasi perkumpulan mahasiswa calon pemimpin, merupakan organisasi yang bergerak di bidang kepemimpinan pemuda. Organisasi ini dirujuk untuk terlibat dalam FGD sebab keaktifan mereka dalam

pergerakan sipil maupun politis. Gerakan itu seperti gerakan membantu masyarakat hingga sosialisasi pemahaman politik dengan komunitas Parlemen Muda Indonesia. Anggota organisasi yang mengikuti FGD juga berasal dari berbagai universitas. Organisasi ini terdiri dari kumpulan pemuda yang memiliki kepedulian untuk melakukan tindakan real di masyarakat dengan kontribusi sipil.

Organisasi sipil pemuda yang berada di bawah perlindungan pemerintah maupun instansi pendidikan

Organisasi alumni pertukaran pemuda merupakan organisasi yang dirujuk sebagai peserta FGD sebab kedekatan mereka dengan institusi pemerintah, kegiatan yang mendukung kemajuan program pemerintah, dan keaktifan mereka dalam rangkaian kegiatan yang berbasis anak muda. Organisasi ini memiliki Ad/ART sebagai organisasi yang dinaungi oleh Balai Pemuda dan Olah Raga atau Dinas Pemuda dan Olah Raga. Melalui organisasi ini, peneliti mampu memperoleh mahasiswa dari berbagai universitas maupun ragam kerja.

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi yang dirujuk sebagai peserta FGD yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas. Organisasi ini dipilih sebagai pembuka dari seluruh FGD untuk memetakan proses FGD. Lihat Tabel 2 tentang karakteristik dari informan FGD

Karakteristik ini dibuat dengan mengikuti kategori organisasi kepemudaan yang mampu memberikan potensi pembentukan modal sosial pada masyarakat sipil, yakni perkumpulan pemuda yang memiliki anggota yang berdasarkan sifat recreational, atau di bawah institusi kependidikan maupun pemerintahan, hingga perkumpulan yang memiliki concern terhadap kontribusi sipil dan politik. Organisasi di atas adalah perwakilan dari kategori tersebut. Variasi umur, pekerjaan, Universitas, hingga jurusan perkuliahan menghasilkan perspektif hingga penekanan terhadap isu dan partisipasi politik yang berbeda.

Informan dalam penelitian ini merupakan pemuda yang sudah terbukti aktif dalam ranah partisipasi sipil terbukti dari keikutsertaan mereka dalam organisasi kepemudaan ini. Penelitian ini ingin melihat partisipasi politik pemuda via media online, sehingga dibutuhkan kumpulan pemuda yang memang sudah aktif secara offline lalu melihat keterlibatan mereka lebih jauh di wilayah online.

Pelaksanaan

Focus Group Discussion dilakukan melalui 4 sesi. Setiap sesi menghabiskan waktu kurang lebih selama

Tabel 2. Karakteristik Informan Focus Group Discussion

n= 25	FGD 1 (n=7)	FGD 2 (n=5)	FGD 3 (n=7)	FGD 4 (n=6)	Total (n= 25)
Umur	19-22	19-22	22-30	20-22	19-30
Jenis Kelamin	P=2, L=5	P=1, L=4	P=2, L=5	P=2, L=3	P=7, L=17
Pekerjaan	Mahasiswa (n=7)	Mahasiswa (n=5)	Mahasiswa (n=4), swasta (n=3)	Mahasiswa (n=5)	Mahasiswa (n=21), Swasta (n= 3)
Jurusan	Ilmu Komunikasi (n=7)	Ilmu Komunikasi (n=2), Hubungan Internasional (n=2), B. Inggris (n=1)	Hubungan Internasional (n=2), Sosiologi (n=1), Ilmu Ekonomi (n=1), Ilmu Komunikasi (n=1), B. Inggris (n=1), Teknik (n=1)	Kedokteran (n=1), Teknik (n=2), Kehutanan (n=1), Hukum (n=1), Ilmu Komunikasi (n=1)	Ilmu Komunikasi (n=11), Hubungan Internasional (n=4), B. Inggris (n=2), Sosiologi (n=1), Ilmu Ekonomi (n=1), Teknik (n=3), Hukum (n=1), Kedokteran (n=1), Kehutanan (n=1)

100-130 menit diskusi. Peserta dipandu oleh Moderator (MR) dan didampingi oleh seorang notulen (DT). Peneliti berfungsi sebagai pengamat dan penelaah proses diskusi. Setiap sesi diskusi dilakukan di berbagai macam tempat seperti kampus, rumah, dan café untuk memastikan kenyamanan peserta. Sebelum FGD dimulai moderator (MR) menjelaskan tujuan dan topik selama sesi. Kata “partisipasi politik” tidak banyak disinggung di awal FGD agar peserta tidak merasa asing terhadap kata “politik.” FGD dilakukan pertama-tama dengan berkenalan dan mempresentasikan identitas masing-masing, termasuk identifikasi mengenai apa kecenderungan pandangan politik mereka dan aksi politisnya.

Flow chart, papan tulis, sticker paper, video camera, dan alat perekam dipakai untuk mendokumentasikan proses FGD. Ini merupakan proses yang melibatkan moderator dan notulen untuk mengelola tempat pelaksanaan FGD sehingga berjalan secara kondusif, santai, dan memiliki nuansa semi formal. Selama diskusi, peserta boleh menanyakan pertanyaan kepada satu sama lain, mengomentari pengalaman satu dengan yang lain. Semua peserta merupakan teman satu organisasi sehingga moderator menjadi kunci bagi focus perhatian bagi peserta FGD. Moderator merupakan mahasiswa komunikasi yang aktif, mampu memimpin grup dalam diskusi, memiliki sense of humor, pengalaman penelitian, dan kemampuan mengartikulasikan pertanyaan FGD menjadi topik diskusi.

Data Analisis

Tape recording dilakukan dengan transkripsi verbatim oleh notulen. Peneliti menggunakan metode sistematis

deskriptif untuk melakukan interpretasi dan analisis data. Metode analisis ini dilakukan dengan melakukan empat langkah. Pertama, teks transkripsi dibaca berulang kali untuk memahami diskusi secara holistic. Kedua, transkripsi diskusi dianalisis baris per baris dan unit arti diidentifikasi. Selain itu peneliti juga menuliskan notes penting untuk menemukan pola untuk memahami arti penting. Langkah ketiga, peneliti mengumpulkan unit-unit arti yang berpola untuk dapat merumuskan sub-tema maupun sub-kategori yang penting. Sub-tema maupun sub-kategori juga bisa diterjemahkan dari teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam proses ketiga ini, peneliti masih sering kali melakukan pemeriksaan ulang pada teks transkripsi. Langkah keempat adalah melalui sub-tema maupun sub-kategori yang telah muncul, maka dirangkai menjadi satu framework untuk memahami aspek partisipasi politik dan kompetensi citizenship seperti yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

Temuan Data

Temuan data kualitatif dari penelitian ini mengindikasikan adanya empat subtema dan satu tema final. Subtemanya antara lain: Identitas Pemuda: Saat Politik Jauh dan Dekat, Ketertarikan Politik seputar Ketokohan, Kampus, dan Isu Kontroversial, Pemetaan Guna dan Penggunaan Sosial Media, Warga Negara yang beraktualisasi diri ala Pemuda.

Identitas Pemuda: Saat Politik Jauh dan Dekat

Pemuda adalah generasi yang sering dilabelkan sebagai generasi yang cukup skeptis terhadap demokrasi dan politik (Levine, 2008). Informan pada penelitian ini memberikan pemahaman mereka sendiri terhadap identitas mereka sebagai pemuda dalam

hubungannya dengan politik. Identifikasi dari pemuda sendiri mengenai: siapa dan bagaimana keaktifan mereka dalam politik akan membantu untuk memetakan seberapa jauh skeptisisme, optimisme, silent in politik, dan aktifisme pemuda.

Aku adalah Silent Majority, saat...

Silent majority adalah salah satu kategori dari keberadaan pemuda dalam politik. Silent majority merupakan kondisi diam yang tidak melakukan apa-apa dan cenderung pesimis apapun tindakan yang dilakukan akan membuahkan hasil. Identifikasi atas identitas menjadi silent majority terjadi saat pemuda:

Merasa tidak punya kapabilitas yang mencukupi untuk memberikan komentar yang berarti.

- Menganggap bahwa sistem di pemerintahan sudah berjalan sebagai mana mestinya.
- Tidak memiliki posisi yang berarti atau power dalam partisipasi politiknya, sehingga anggapan bahwa memiliki posisi dalam pemerintahan akan memberikan kontribusi politis.
- Masa bodoh atau tidak peduli dengan apapun hasilnya dalam proses politik maupun demokrasi.

Melalui tabel 3 dapat dilihat bahwa identifikasi dari pemuda, saat mereka hanya bisa menjadi silent majority adalah saat adanya ketidakmampuan atau disempowerment bahwa ketika pemuda berpendapat atau melakukan sesuatu, maka akan efeknya. Selain itu, ketidakpedulian juga menjadi salah satu faktor yang membuat pemuda menjadi silent majority. Melalui temuan ini dapat dikaitkan "diam"-nya anak muda adalah saat mereka melihat bahwa tidak ada akses maupun pengaruhnya mereka melakukan sesuatu. Power menjadi isu yang penting bagi pemuda. Saat ada kesempatan dan dorongan bagi pemuda untuk berpikir bahwa saat mereka bersuara akan menimbulkan dampak, paling tidak opini publik terhadap suatu keputusan politik (LiPuma & Koelble, 2009; Mc Kenzie, 2007; van Londen et al., 2007), maka ini dapat membangkitkan "diam"-nya pemuda untuk melakukan sesuatu. Apalagi dengan adanya perkembangan media online. Para pemuda dengan kemampuan tangkap dan tanggap teknologi yang lebih cepat mampu memanfaatkan media online ini untuk terlibat secara sosial dan politik.

Aku aktif dalam politik, saat...

Keaktifan dalam politik menjadi salah satu aktifitas yang berhubungan dengan partisipasi politik. Para informan mengidentifikasi keaktifan mereka dalam politik melalui berbagai kondisi, misalnya:

Keaktifan dalam kompetensi kognitif atau afektif, yakni aktif dalam mencari informasi dan mengikuti perkembangan isu.

Keaktifan dalam hal yang afektif yakni berdiskusi dan mengkritisi tokoh atau isu dengan teman sejawat.

Melalui tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pemuda pun mengidentifikasikan keaktifan sebenarnya tidak jauh dari ranah kognitif dan afektif, yang artinya bersuara dan mencari informasi di area publik. Bagi pemuda, partisipasi aktif ditandai dengan adanya kebebasan informasi dan aksesibilitas informasi. Proses sharing informasi di antara teman sejawat, meskipun kelompok kecil, mampu menggiring opini publik pada suatu keputusan politis. Diskusi atau sharing juga membuat mereka mampu mengevaluasi pilihan-pilihan yang sudah mereka buat. Sosial media memungkinkan key opinion atau opinion leader untuk mempengaruhi public kecil di sekitarnya. Komunitas kecil ini mampu meningkatkan hubungan interpersonal dan area konektivitas bagi masyarakat sipil. Putnam (1993) menekankan bahwa area diskusi ini justru adalah area yang sifatnya rekreasional atau dibentuk dalam recreational sphere, meskipun materi yang dibahas adalah materi politik.

Aku Skeptis pada Politik, saat...

Pemuda sering dianggap skeptic terhadap politik terhadap politik. Suatu sikap yang cenderung tidak percaya, meragukan, dan mempertanyakan efek dan proses demokrasi. Pemuda menyebut diri mereka skeptic terhadap politik pada saat tertentu.

Pemuda skeptic pada politik saat melihat tokoh pelaku politik dinilai tidak mampu memberikan teladan dan tuntunan. Image yang baik dari seorang politisi mampu mengurangi skeptisisme, tetapi jika politisi tersebut memang tidak kompeten, pemuda menjadi skeptic, bahwa politik dikuasai oleh orang yang tidak akan memberikan dampak baik pada masyarakat.

Pemuda skeptic saat mereka tidak memahami dampak sistemik dari pilihannya.

Melalui tabel 5 dapat dilihat bahwa dalam grup-grup informal, individu berdiskusi tentang seorang tokoh atau suatu situasi politik. Jika tidak ada trust yang dimunculkan oleh seorang tokoh atau situasi politik maka skeptisisme akan muncul (Mouritsen, 2003). Diperlukan tokoh-tokoh yang mampu membangun kepercayaan pemuda untuk memandang masa depan politik yang positif dari suatu bangsa, maka skeptisisme di kalangan pemuda bisa dihindari.

Aku Optimis pada politik, saat...

Optimisme pada politik dan proses demokrasi merupakan sebuah pengharapan yang positif untuk

Tabel 3

Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
<p>Kenapa silent majority karena saya lebih bersifat tidak mau mengomentari misalkan politik yang terjadi di kasusnya Indonesia jadi tidak suka dan tidak mau sebenarnya karena membahas politik misalkan dengan teman atau dengan orang lain kita nggak tau karena mungkin kita anak kuliah dan kita tahu bahwa untuk membuktikan sesuatu kita harus punya data dan analisis yang seharusnya tepat dan benar dan bisa dibuktikan tidak sekedar hanya berkata pendapat bahwa orang ini salah atau orang ini benar. Misalkan ada isu tentang undang-undang atau perencanaan undang-undang atau misalkan kebebasan berbicara atau untuk itu. Untuk urusan undang-undang atau untuk berkomunikasi dalam media kita tidak bisa langsung mengatakan itu baik atau tidak baik karena sebenarnya butuh analisis dan butuh penelitian terhadap itu jadi jika ada itu saya secara pribadi akan ikut serta dan akan berpendapat tapi dilain di luar pada itu jika ada yang berbicara tentang politik mengatakan bahwa –ooh sebaiknya yang memimpin ini atau yang ini ya ini-saya lebih bersifat pasif dan tidak mengikuti alur pembicaraan atau alur diskusi</p>	<p>Kenapa milih silent majority soalnya dalam sistem yang demokrasi kan itu udah ada sistemnya maksudnya kalau misalnya tentang rakyat sama pemerintahan, nah kalau misalnya mau ada aspirasi yaudah ada parlemen ada media massa ada apa ada apa. Nah akhirnya orang yang bersuara udah ada jalan-jalannya dan kenapa milih silent akhirnya soalnya kan udah diwakili juga sama parlemen-parlemennya. Nah pendirian saya itu kenapa milih silent karena pemerintah juga enggak bakal semena-mena juga buat mengapply satu policy misalnya kaya' gitu jadi akhirnya mereka kan berdasarkan expertise jadi mereka berdasarkan pengalaman atau mereka berdasarkan SOP yang udah ada. Nah akhirnya itu enggak akan memberikan satu mm apa ya, kerugianlah buat masyarakat, kalau misalkan ada tuh ya udah ada sistemnya juga kaya' misalnya nanti ada partai oposisinya ada apanya ada apanya nah jadi mending jadi silent majority nah akhirnya ada orang-orang yang lebih aktif yang sudah mempunyai power yang lebih lah dari saya pribadi untuk menyuarkan sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, kaya' gitu.</p>	<p>Alasannya adalah kalau silent majority aku lebih suka mengamati politik tapi tidak suka berkecimpung dalam bidang politik karena kalau menurut saya ya sebagai apasih, orang yang enggak ada kepentingan dalam bidang politik ya tapi punya keinginan untuk mengetahui politik itu gimana gitu, lagian kalau tidak ada suatu posisi di bidang politik seperti berkecimpung atau apa itu tidak ada gunanya tetapi kalau kita mengetahui politik paling tidak seluk beluk pemerintahan itu tahu. Dan ketika kita udah punya posisi dalam pemerintahan kita baru bisa mengutarakan apa yang kita ketahui ataupun diinginkan.</p>	<p>Kalau ditanya politic majority karena ee karena aku sendiri itu enggak peduli sama politik karena kalau misalnya apapun yang terjadi aku jadi mau sistem pemerintah kaya apa mau kebijakannya kaya apa selagi itu tidak mengganggu hidup ee secara pribadi yaudah nggakpapa yang penting aku tetep independent dan enggak peduli sama sistem politik.</p>	<p>Silent'nya itu maksudnya adalah aku emang seneng ngobrolin tapi aku masa bodoh gitu lho mau ada caleg ngapain mau ada kampanye-kampanye mau ada Pilkada, ya aku nyoblos ya nyoblos tapi soal hasil gitu aku nggak peduli.</p>

Tabel 4

Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
Kalau yang active itu sebenarnya bukan active dalam apa namanya, aktifnya itu lebih ke gimana mencari tahu atau mengkritisi soal politik tapi khususnya wakil pemerintahan di Indonesia. Itu lebih ke aktif dalam hal mengkritisi, mendiskusikan tapi dalam lingkup kecil aja sama temen-temen dekat.	Kalau Pilpres aktif. Aktif, suka diskusi dan biasanya diskusinya lebih yang kaya ... diskusi sing raono ujung'e kuwi lho . Nah diskusi seneng-seneng, dan itu menjadi keseharian gitu lho, sehari-hari ada lagi obrolan itu gitu dan kayak harus ada dan itu menyenangkan.	Aktifnya seperti apa, ee lebih ke ngikutin isu tentang politik. Terus sama berkomentar di social media untuk mengedukasi tentang politik ke temen-temen dan mencoba untuk apa ya, saling sharing sama temen-temen sih, kaya' gitu. Karena kalau diam enggak ada perubahan.	Mm kalau aku sih ngeliatnya buat diriku sendiri sih jadi aku aktifnya kaya' pingin tau kira-kira yang mau nyalon siapa aja, backgroundnya seperti apa terus kaya yang poster-poster legislatif tu tak liatin dia tu jurusannya apa terus pendidikannya udah sampai mana kaya gitu doang. Cuman buat gitu sih, maksudnya aku buat meyakinkan bahwa yang aku pilih itu adalah yang emang kira-kira bagus gitu.	Aktifnya mirip-mirip kaya' Icha, kaya' Suke, jadi kalau ada komentar-komentar langsung mengutarakan, tapi konteksnya mengutarakannya saya pikir aktif karena ada wadah-wadah organisasi, jadi kadang-kadang merealisasikannya lebih dekat ke institusi gitu kan, apakah menyampai-kan langsung ke kementrian kek, jadi kita punya channel, kita merasa aktif karena terfasilitasi oleh channel yang terbuka ke sang penguasa.

melihat masa depan politik Indonesia. Ada kalanya pemuda merasa optimis pada demokrasi di Indonesia dan dunia politik.

Adanya kebebasan dalam berpolitik dan berdemokrasi yang diberikan kepada pemuda melalui media massa maupun organisasi

Adanya sistem demokrasi yang terus bergulir dengan lancar, sehingga perkembangannya dapat dilihat dari waktu ke waktu.

Melalui tabel 6 dapat dilihat bahwa pemuda Indonesia optimis terhadap demokrasi dan politik karena melihat adanya perkembangan pada demokrasi di Indonesia, kebebasan berpolitik, mencari informasi dan ekspresi diri juga ada di Indonesia. Optimisme pada politik dan demokrasi merupakan bagian penting dari pembentukan modal sosial (Putnam, 2003; Mouritsen, 2003). Pembentukan modal sosial dimulai dari adanya kebebasan komunitas atau individu di area public untuk berdiskusi dan menentukan sikap untuk menyokong atau melawan pemerintah. Putnam menyebut ini sebagai *liberta commune* atau "liberty as common good" atau adanya kebebasan dalam komunitas (Putnam dalam Mouritsen, 2003, p. 654). Kontribusi yang sifatnya meningkatkan elemen kebebasan dalam proses berdemokrasi. Interaksi dalam kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi ini berakibat pada peningkatan kompetensi politik, pandangan

egaliter, kemampuan berkompromi, hingga perhatian kepada tokoh politik tertentu yang perlu didukung (Albrecht, 2006; Mc Kenzie, 2007; Mouritsen, 2003). Kesadaran pemuda bahwa kebebasan berpolitik, berpendapat, berorganisasi merupakan modal awal bagi *liberta commune*. Kebebasan ini perlu dilihat sebagai keinginan pemuda berpartisipasi. Tetapi bagaimanakah pemetaan bentuk partisipasi pemuda via media online? Berikut adalah pemetaan penggunaan sosial media oleh pemuda. Lihat Grafik 1 Pemetaan Penggunaan Sosial Media

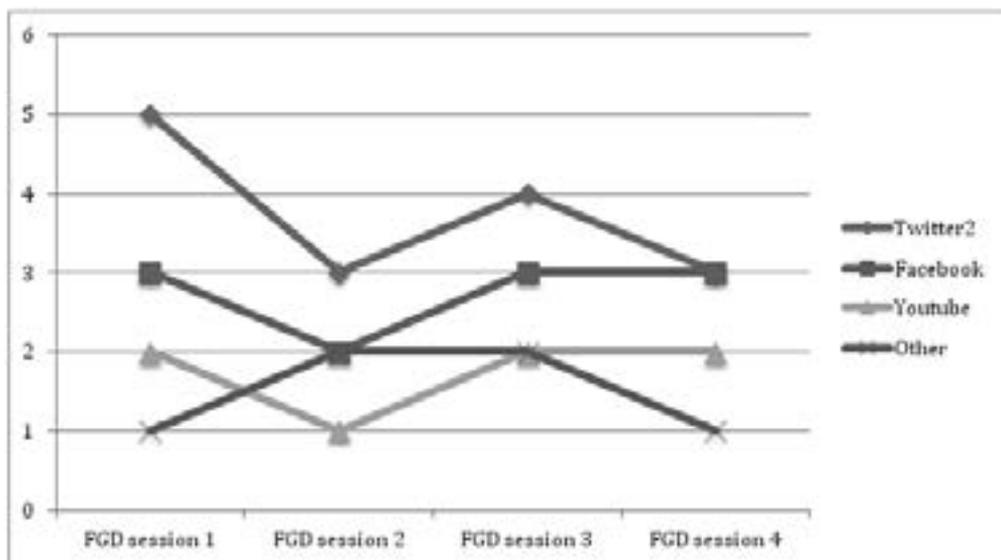
Grafik 1 menunjukkan gambaran pilihan sosial media yang digunakan oleh peserta FGD. Sebagian besar memilih Twitter sebagai media untuk berinteraksi sosial dalam ranah politik. Facebook sebagai pilihan kedua, Youtube sebagai pilihan ketiga, dan lainnya yakni website diskusi media massa, kaskus, dan forum grup privat. Grafik tersebut tidak untuk menunjukkan statistik dari fenomena penggunaan sosial media tetapi untuk menunjukkan bagaimana tiga media sosial ini menjadi area berpolitik yang penting untuk pemuda, seperti penjelasan berikut ini:

Twitter: Peserta FGD menggunakan media sosial ini untuk melakukan update informasi otomatis melalui beranda Twitter. Peserta juga menunjukkan keuntungan dari kegunaan Twitter yakni dengan melakukan follow terhadap tokoh politik, media massa, gerakan politik,

Tabel 5

Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
<p>Ee untuk yang secara umum sih enggak memandang Pilpres atau apa untuk yang ke Pilpresnya skeptis sih soalnya dari kecil ya itu tadi, banyak ee orang tua baca koran dan nyeritain kita trus di lingkungan itu juga kebetulan orang-orang gedhe tu banyak dan bahkan dua bulan, bahkan satu tahun sebelum pilkadapun mereka udah mulai kalau yang memperhatikan mereka, mereka tu aneh. Itu aja dalam lingkup kecil aja kayak gitu, nah sekarang waktu berangkat gedhe melihat lebih luas pilpres, pilpres tu ternyata kayak gitu, kayaknya aku yang sekecil ini apa bisa merubah, emang sih aku punya power dengan aku bisa milih sekarang, tapi apa iya sih satu pilihanku itu bisa mempengaruhi pilihan itu</p>	<p>Kalau itu sih cenderung karena yang dipilih siapa masih belum tahu dan itu tadi balik ke yang pertama skeptis aja maksudnya kaya' – gaada bedanya deh buat ngevote kaya'nya gabakal berubah seluruh keputusan eh hasil voting itu sendiri-, apalagi belum yakin sama yang mau dipilih</p>	<p>Ini tergantung konteksnya. Ya mesti optimis karena ya, enggak juga optimis, apa ya? Tergantung konteksnya. Misalkan kalau liat kaya' cerita gitu, misalnya aku paling suka liat Mata Najwa, kalau ngeliat acara-acara yang gimana kaya' Jokowi, sang pencerah atau apa itu lho, itu bagus tapi kalau mewawancara Angel Lelga kitu kaya'e aku enggak milih ajadeh gitu. Jadi tergantung konteksnya gitu lho.</p>	<p>Oleh karena itu saya optimis kalau politik itu bisa berfungsi ketika orang yang ada di level eksekutif itu adalah orang yang tepat. Tapi kalau legislatifnya ya saya juga skeptis sih.</p>

Grafik 1. Pemetaan Partisipasi Politik Pemuda di Media Online



dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, peserta juga menunjukkan keikutsertaannya melakukan sharing informasi politik jika dirasa perlu dan sesuai dengan kepentingan maupun kesukaan mereka dengan melakukan Retwit.

Facebook: Peserta FGD menggunakan media sosial ini untuk berbagi informasi, isu, maupun berita politik melalui Status Facebook mereka. Selain itu, peserta FGD menggunakan media ini untuk berkomentar ke status orang lain hingga mengikuti atau membentuk grup atau forum diskusi yang sesuai dengan ranah mereka maupun ketertarikan mereka.

Youtube: Peserta FGD menggunakan media ini untuk mendapatkan informasi atau berita secara audio visual. Peserta juga menggunakan Youtube untuk membuat produksi kreatif berkaitan dengan politik. Lihat Grafik 2. Pemetaan kompetensi citizenship dalam sosial media

Grafik pemetaan kompetensi citizenship dalam sosial media adalah aspek kognitif dan afektif yang dominan. Aspek ini dapat dilihat dari aktifitas sosial media yang kerap dilakukan oleh peserta FGD. Lihat tabel 6 tentang aktifitas untuk setiap kompetensinya.

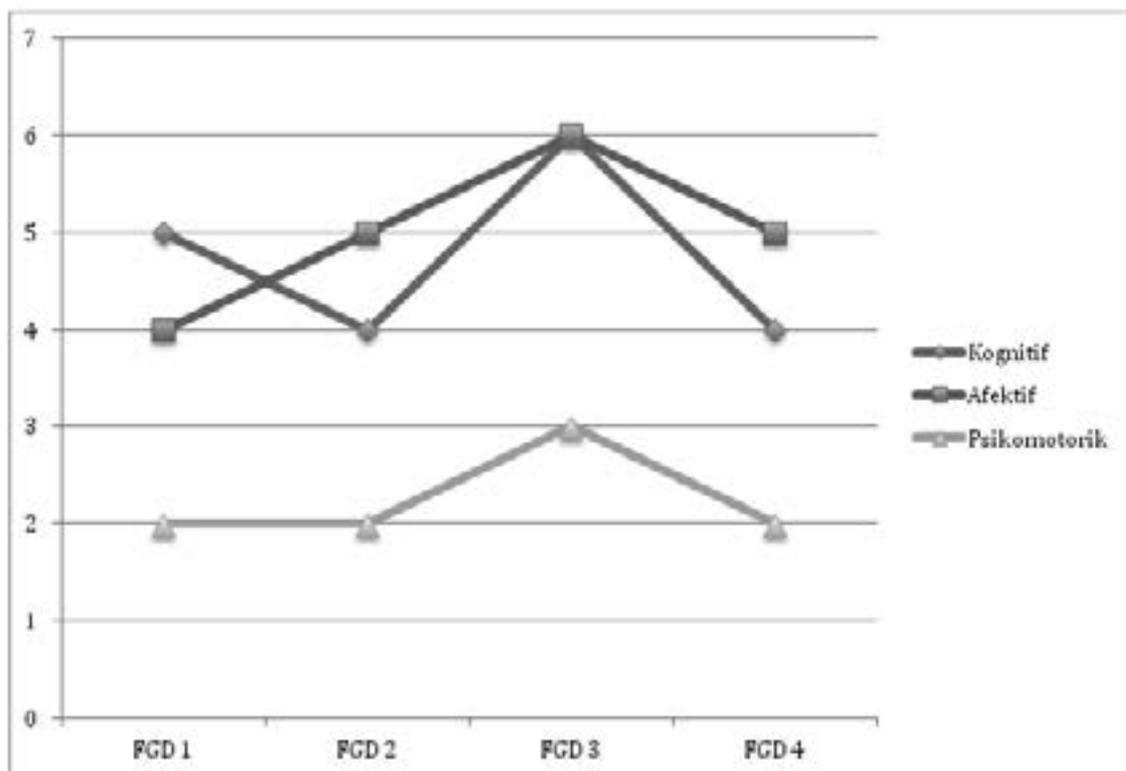
Pembahasan

Robert Putnam (1993) mengembangkan konsep civil society atau masyarakat sipil, social capital atau

modal sosial, hingga pembangunan “democracy which works” dimulai dari lingkungan atau organisasi sipil yang menyesuaikan diri dengan media komunikasinya. Demokrasi yang terjadi dalam ranah media sosial terutama untuk pemuda saat ini masih banyak ada di ranah kognitif dan afektif. Artinya pemuda lebih menggunakan sosial media untuk mendapat informasi dan berekspresi. Meskipun begitu Civil society sendiri tetap terbentuk, sebab ranah kognitif dan afektif adalah merupakan bentuk partisipasi yang juga diakui dalam demokrasi untuk membentuk network para warga Negara yang aktif pada tingkat lokal (Mouritsen, 2003). Interaksi antara warga Negara yang aktif ini dapat menghasilkan modal sosial (social capital) yang akan membantu terbentuknya komunitas sipil. Misalnya dengan partisipasi kognitif dan afektif ini dapat menciptakan opini public yang mendorong pemuda memilih kandidat tertentu atau mengikuti atau sekedar menyukai gerakan sosial tertentu seperti studi kasus di etnis Turki dan Maroko di Belanda (van Londen, Phalet, & Hagendoorn, 2007) dan pda organisasi masyarakat kelompok Afrika-Amerika di Amerika Serikat (Mc Kenzie, 2007).

Modal sosial atau social capital tercipta dari keberadaan partisipasi politik, kualitas administrasi pemerintahan, perkembangan ekonomi, produktivitas

Grafik 2. Pemetaan kompetensi citizenship dalam sosial media



Tabel 6 tentang aktifitas untuk setiap kompetensinya.

Kompetensi	Jenis aktifitas
Kognitif	<p>Mencari dan mendapatkan informasi:</p> <p>“Mungkin itu aja sih soalnya lebih suka ngobrolnya digrup, itupun temen-temen yang sepermainan. Website pemerintah baca. Paling Kemenlu, OJK, paling itu aja, paling suka BMKG sekarang. Kalau informasinya bagus paling aku share, itu aja sharenya ke grup whatsapp.”</p> <p>“Ya dengan online dapetin informasi yang lebih praktis aja gitu. Apalagi anak muda kan pasti enggak terlalu mengikuti dengan adanya media online itu kita yang suka bersosialita itu jadi ngerti infonya lebih praktis aja.”</p>
Afektif	<p>Membuka wacana dengan ekspresi diri, persuasi, negosiasi, dan kesukaan.</p> <p>“Kalau pak SBY palingan ngeretweet ya ngomen-ngomen dikitlah, waktu yang ini, waktu yang TKI Malaysia yang dihukum mati sementara dia yang dilibatkan oleh bunda putri, ngomen-ngomen dikitlah, cuman enggak langsung mention, kaya’ buat cool tweet aja di twitter”</p> <p>“Ya tergantung, kalau di facebook info itu menarik untuk saya share ya saya share gitu, atau kalau saya lagi males ya kalau saya tertarik Cuma saya like doang gitu”</p>
Psikomotorik	<p>Bergabung dengan grup dan jaringan termasuk koordinasi grup dan organisir jaringan, mengambil sikap, mendukung partai, dll.</p> <p>“Terus youtube itu kaya’ liat misalkan iklan layanan masyarakat, terus sempet juga sama temen-temen IFL buat video tentang apa ya, intinya ruginya golput”</p> <p>“Kalau di facebook iya, menggalang campaign, jadi saya pernah ngeluarin salah satu status itu yang mengajak mereka kalau ketemu mobil partai atau apa lempar koin aja, jadi gerakannya namanya coin for chances. Aku juga menjadi blower di salah satu kasus korupsi, seriously udah dua orang kemenpora di pensiunkan dini.”</p> <p>“Pake, pake twitter, facebook, dan youtube. Dan kita kaya’ bikin apa ya, kaya laporan diskusinya apa, terus kaya’ life tweet, semuanya, bahkan yang enggak bisa dateng kemudian bisa komentar disitu. Pernah jadi PO salah satu diskusinya. Dulu sih aku mbahasnya karena aku tertarik ya dari HI jadi waktu itu mbahas tentang satu film The Mirror of The World, jadi kita diskusi dari bermacam perspektif kaya’ gitu. Ada yang karena kita ngundang beberapa pembicara untuk mengomentari itu dari keparannya dia gitu, dari sisi kiri dari sisi kanan, maksudnya dari yang pro kapitalism ada yang anti, bahkan ada yang teman satu kontrakan yang dia memang anti banget sama indomaret. Diskusinya memang ada, namanya Komunitas BulakSumur.”</p>

populasi, hingga karakter responsive dari pemerintahan setempat dan komunitas masyarakat (Putnam, 1993; Mouritsen, 2003). Melalui sosial media partisipasi politik terbentuk dan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau isu politik pun dapat diwadahi dengan cepat. Komunitas ini mampu meningkatkan hubungan interpersonal dan area konektivitas bagi masyarakat sipil. Sifat sosial media yang anonim juga mempermudah pemuda untuk berpartisipasi.

Karena social media digunakan banyak orang jadi mudah menyebar di publik, kalau misalnya bahasannya itu tentang promosi sesuatu yang politik. - F

Karena anonymous. Walaupun kita pakai nama kan enggak ada yang tau itu bener, apalagi kalau misalnya nama gue Hepi Caemping Sayang. Iya, jadi kalau kita lagi ngata-ngatin apalagi saya suka ngomong SARA, nanti kalau "Hei FPI sini kalau berani" tapi enggak ada yang datang juga sih. - H

Putnam (1993) menekankan bahwa area konektivitas ini justru adalah area yang sifatnya rekreasional atau dibentuk dalam recreational sphere. Media sosial memang sangat rekreasional meskipun tampak tidak political enough atau lebih cenderung pada aktivitas sosial dan bukan aktivitas politik (Mouritsen, 2003), tetapi kepercayaan yang dibangun untuk membentuk area public yang bebas memang membantu terbentuknya atmosfer demokrasi di media sosial. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kebebasan penggunaannya untuk berpartisipasi secara rekreasional dan non formal. Komunitas online ini mampu menyokong atau melawan pemerintahan (Putnam, 1993; Mouritsen, 2003).

Mungkin kalau misalnya ada yang menarik, promosi yang menarik, mungkin ngajak orang-orang terdekat "eh liat itu" maksudnya liat untuk dikomen juga gitu. (Misalnya isu apa?) Ya enggak, misalnya kaya' ada iklan-iklan yang aneh, nyleneh gitu kan, terus ngajak yang lainnya "eh menurutmu ini gimana?" . Dan mengajak untuk enggak golput juga, secara personal.-I

Soalnya media online itu yang bebas tanpa batas jadi idenya siapa aja silahkan keluarkan jadi itu nggak akan ada batasnya dan tidak ada hak untuk melakukan sesuatu terhadap orang aslinya. Kaya' misalnya untuk mengkritisi pengamat atau yang online di media gitu gitu lah, jadi kaya misalnya dia mau bilang kalau BBM naik terus bilang kalau -eh presidennya apa- gitu misalnya dalam sensor yaudah terserah maksudnya selama orang itu tidak tersinggung dan apa maksudnya memang bisa ngerti bahwa online itu sebagai suatu tempat aspirasi orang dan mengungkapkan isi hati orang ya kenapa enggak gitu.-B

Kontribusi media sosial bagi pemuda secara politis mampu membuat interaksi masyarakat. Interaksi ini menciptakan kompetensi politik dari sisi kognitif,

afektif, maupun psikomotorik, pandangan yang egaliter, dan kemampuan kompromi (Albrecht, 2006; Mc Kenzie, 2007; Mouritsen, 2003). Tampaknya, ini menjadikan media online memiliki potensi untuk menciptakan "liberty as common good" (Putnam dalam Mouritsen, 2003, p. 654).

Klasifikasi citizenship menjadi Dutiful Citizenship (DC) atau Warga Negara yang melaksanakan kewajiban (WNK) dan Self Actualized Citizenship (AC) atau warga Negara yang mengaktualisasi diri (WNAD) berhubungan erat dengan area berpartisipasi yang luas di media online. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh praktik klasifikasi citizenship adalah sebagai berikut.

Pengetahuan yang penting untuk menjadi warga Negara yang efektif (knowledge), kompetensi ini berada dalam ranah kognitif. Pengetahuan menjadi milik bersama, dibagikan, dan semua berkesempatan menjadi guru bagi yang lain. Rasa ingin tahu atau pencarian informasi dapat meluas tanpa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu (Bennett et al., 2011)

Keterampilan berekspresi yang perlu dikomunikasikan secara efektif (skill for expression), kompetensi ini masuk dalam area afektif. Media sosial, memungkinkan pemuda berekspresi dan menjangkau khalayak yang luas. Wacana yang beredar pun semakin semarak. Mulai dari komunitas kecil hingga umum/public (Bennett et al., 2011).

Media online mempermudah pemuda untuk bergabung dengan jaringan atau grup tertentu. Selain itu, pemuda juga dapat mengorganisir suatu acara atau opini politik.

Kemudahan partisipasi politik di media sosial juga menimbulkan sikap yang tidak turun ke offline untuk melakukan sesuatu pula. Pada tahap psikomotorik, pemuda berpikir ulang tentang komitmennya. Melakukan suatu aksi di media sosial atau media offline membutuhkan komitmen yang tinggi (Torney-Purta et al., 2001 dalam Bennett et al., 2011)

Kategorisasi ini bekerja sebagai framework untuk membantu operasionalisasi hasil penelitian yang bisa digali lebih jauh dalam penelitian selanjutnya. Platform DC/AC dapat membantu peneliti mentakar sejauh mana partisipasi pemuda di media online.

Kesimpulan Dan Saran

Perkembangan teori dan keilmuan mengenai media online sebagai ruang publik untuk berpolitik bagi pemuda sudah menjadi wacana yang telah diperdebatkan dan diteliti oleh akademisi dan para ahli. Tetapi memang penelitian yang mendokumentasikan secara rinci tentang partisipasi pemuda di media online di Indonesia khususnya Yogyakarta belum banyak dilakukan. Pemuda sebagai generasi "transisional"

(White & Naafs, 2012) menjadi kelompok publik yang dominan dalam partisipasi politik di media online (Bennett & Segerberg, 2011; Bennett, Wells, & Freelon, 2011; Dahlberg, 2001), jangkauan partisipasinya pun mengarah ke afektif dan kognitif. Ini merupakan sebuah indikasi positif terhadap partisipasi pemuda dalam demokrasi. Mereka paham dan mengikuti informasi yang ada di media sosial. Sebagai “digital native,” “generation Y,” “Net Generation,” partisipasi politik pemuda masih perlu ditingkatkan. Adanya komunitas atau organisasi yang bisa melakukan empowerment pada pemuda untuk semakin terlibat di media online terutama ranah psikomotorik sangat diperlukan sebab media online menawarkan berbagai kesempatan untuk pemuda agar terlibat dalam politik dan berpartisipasi sebagai warga Negara (citizenship). Gaya pemuda yang bebas, egaliter, cara berkomunikasi yang partisipatif dan on demand sesuai dengan public sphere yang ditawarkan media sosial. Partisipasi ini mampu mengikuti gaya hidup mereka (civic style), mengikuti cara berkomunikasi pemuda (communication style), dan membangun terbentuknya komunitas online pemuda (Bennett et al., 2011; Woolley, Limperos, & Oliver, 2010). Oleh karena itu, ada banyak area untuk mengembangkan teori dan konsep partisipasi kepemudaan dalam dunia online.

Penelitian ke depan dapat melakukan studi komparatif ke Negara lain, sehingga dapat dilihat dimana pemuda berpartisipasi di media online dan sejauh apa partisipasinya. Selain itu bentuk penelitian survey kuantitatif juga sangat diperlukan untuk memahami lebih rinci tentang pemuda, politik, dan media sosial ini (Loudon, 2010).

Daftar Pustaka

- Adji, P. (2010). Representasi dan Ideologi Kota Yogyakarta dalam Novel Yogyakarta Karya Damien Demantra. In *Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (Vol. XXXII)*. Presented at the *Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra XXXII*, Yogyakarta.
- Albrecht, S. (2006). Whose voice is heard in online deliberation?: A study of participation and representation in political debates on the internet. *Information, Communication & Society*, 9(1), 62–82. doi:10.1080/13691180500519548
- Aparaschivei, P. A. (2011). The Use of New Media in Electoral Campaigns: Analysis on the Use of Blogs, Facebook, Twitter and YouTube in the 2009 Romanian Presidential Campaign. *Journal of Media Research-Revista de Studii Media*, (2 (10), 39–60.
- Auliya, H. (2011). *Kontestasi Kader Muslimat NU dalam Domain Politik*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bennett, W. L. (2008). *Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth*. MIT Press.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2011). DIGITAL MEDIA AND THE PERSONALIZATION OF COLLECTIVE ACTION: Social technology and the organization of protests against the global economic crisis. *Information, Communication & Society*, 14(6), 770–799. doi:10.1080/1369118X.2011.579141
- Bennett, W. L., Wells, C., & Freelon, D. (2011). Communicating Civic Engagement: Contrasting Models of Citizenship in the Youth Web Sphere. *Journal of Communication*, 61(5), 835–856. doi:10.1111/j.1460-2466.2011.01588.x
- Bimber, B., Flanagin, A., & Stohl, C. (2012). *Collective Action in Organization*. New York: Cambridge University Press.
- Dahlberg, L. (2001). The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615–633. doi:10.1080/13691180110097030
- Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2008). Digital media and youth: Unparalleled opportunity and unprecedented responsibility. *Digital media, youth, and credibility*, 5–27.
- Hoff, J. (2010). *The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy*. *Information, Communication & Society*, 13(8), 1230–1232. doi:10.1080/1369118X.2010.512637
- Lee, D. (2011). Images of Youth: on the Iconography of History and Protest in Indonesia. *History and Anthropology*, 22(3), 307–336. doi:10.1080/02757206.2011.595003
- Levine, P. (2008). A public voice for youth: The audience problem in digital media and civic education. *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*, 119–138.
- Lim, M. (2012). Life Is Local in the Imagined Global Community: Islam and Politics in the Indonesian Blogosphere. *Journal of Media and Religion*, 11(3), 127–140. doi:10.1080/15348423.2012.706144
- LiPuma, E., & Koelble, T. A. (2009). Social Capital in Emerging Democracies. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 20(1), 1–14. doi:10.1007/s11266-

- 008-9076-6
- Loudon, M. (2010). ICTs AS AN OPPORTUNITY STRUCTURE IN SOUTHERN SOCIAL MOVEMENTS: A case study of the Treatment Action Campaign in South Africa. *Information, Communication & Society*, 13(8), 1069–1098. doi:10.1080/13691180903468947
- Maireder, A., & Schwarzenegger, C. (2012). A MOVEMENT OF CONNECTED INDIVIDUALS: Social media in the Austrian student protests 2009. *Information, Communication & Society*, 15(2), 171–195. doi: 10.1080/1369118X.2011.589908
- Malik, A. (1968). Promise in Indonesia. *Foreign Affairs*, 46(2), 292–303.
- Mc Kenzie, B. D. (2007). Reconsidering the Effects of Bonding Social Capital: A Closer Look at Black Civil Society Institutions in America. *Political Behavior*, 30(1), 25–45. doi:10.1007/s11109-007-9038-5
- Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2008). *Digital Media, Youth, and Credibility*. MIT Press.
- Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism? *Social research*, 745–758.
- Mouritsen, P. (2003). What's the civil in civil society? Robert Putnam, Italy and the Republican tradition. *Political Studies*, 51(4), 650–668.
- Murti, D. C. W. (2013). Keyboard Action End up Political Party: Understanding the Intertwining Relations of Social Media Activism, Citizenship, and the Dynamics of Democracy in Indonesia. *Online Journal of Communication and Media Technology*, 3(2), 32–53.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work*. New Jersey: Princeton University Press
- Rukminijati, T. & Rais, A. (1994). Peranan Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam Pembangunan Politik (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). Thesis S2 Ilmu Politik ix, 102. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Retrieved from http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=KNPI%20Jawa%20Barat&self=1&op=review
- Situmorang, J. R. (2013). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1). Retrieved from <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JABCebis/article/download/658/591>
- Van Heelsum, A. (2005). Political participation and civic community of ethnic minorities in four cities in the Netherlands. *Politics*, 25(1), 19–30.
- Van Londen, M., Phalet, K., & Hagendoorn, L. (2007). Civic Engagement and Voter Participation among Turkish and Moroccan Minorities in Rotterdam. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 33(8), 1201–1226. doi:10.1080/13691830701613991
- Ward, J. (2011). REACHING CITIZENS ONLINE: How youth organizations are evolving their web presence. *Information, Communication & Society*, 14(6), 917–936. doi:10.1080/1369118X.2011.572982
- White, B. N. F., & Naafs, S. (2012). Generasi antara: refleksi tentang studi pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89–106.
- Woolley, J. K., Limperos, A. M., & Oliver, M. B. (2010). The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of User-Generated Political Facebook Groups. *Mass Communication and Society*, 13(5), 631–652. doi:10.1080/15205436.2010.516864